

ABSTRAK

Yova Oktaviari Aripin:

Kegiatan bisnis selalu diawali dengan pembuatan perjanjian. Demikian pula halnya dengan perjanjian keagenan. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang keagenan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran agen atau distributor barang dan/atau jasa. Perjanjian kerjasama keagenan dengan Nomor: 01/PJU-X-41/2018 antara PT. Petrolindo Jaya Utama dengan Pangkalan Dede Aripin merupakan rangkaian kegiatan transaksi bisnis dalam bentuk penyaluran dan pemasaran gas elpiji 3 (tiga) kg di Kecamatan Karangnunggal. Tetapi pada pelaksanaannya salah satu pihak telah melakukan ingkar janji tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu Pasal 2 (dua).

Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan dengan Nomor: 01/PJU-X-41/2018, untuk mengetahui kendala yang termuat dalam perjanjian, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan jual beli elpiji 3 (tiga) kg di Karangnunggal.

Ada beberapa teori hukum tentang perjanjian yaitu, asas *pacta sunt servanda* didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihaknya. Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menegaskan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-DAG/PER/3/2006 Pasal 1 ayat (3) tentang keagenan. Menurut Munir Fuady ada beberapa teori hukum tentang perjanjian yaitu teori sama nilai dan teori ekspresif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan gambaran perjanjian keagenan antara PT. Petrolindo Jaya Utama dengan Pangkalan Dede Aripin. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu data observasi secara langsung kepada objek yang akan diteliti dengan cara melakukan wawancara, dan mengumpulkan data-data yang ada di lapangan dan kesimpulan menganalisis dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama elpiji 3 (tiga) kg antara PT. Petroilindo Jaya Utama dengan pangkalan Dede Aripin tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian, sehingga kerjasama yang dilakukan tidak terlaksana dengan baik. Pihak agen PT. Petrolindo Jaya Utama tidak melakukan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Terdapat beberapa kendala yang termuat dalam perjanjian diantaranya Kurangnya tenaga pengawas dan pembina dari Pertamina, keterlambatan dalam pendistribusian gas elpiji 3 (tiga) kg, kurangnya jumlah penerimaan gas elpiji. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak pangkalan yaitu melakukan musyawarah dan menggunakan kendaraan pribadi dalam pendistribusian gas elpiji 3 (tiga) kg.